

# BAB I

## PENDAHULUAN UMUM

### 1.1. Latar Belakang

Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dan membangun relasi secara luas di ruang daring (Bamboomedia, 2008). Sejak dirilis pada 4 Februari 2004, platform ini berkembang menjadi medium penting dalam penyebaran informasi dan penyampaian aspirasi publik karena kemudahan mengakses media sosial ini walaupun dalam kondisi jaringan internet yang terbatas (datatempo.co, 2022). Peran politik Facebook mulai terlihat dalam peristiwa Arab Spring, ketika platform ini digunakan untuk membangun opini publik dan memobilisasi dukungan masyarakat lintas negara (Wolman, 2013). Praktik diskursif serupa juga berlanjut dalam gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat pada 2014. Mereka memanfaatkan Facebook untuk membangun jaringan, memperkuat narasi tandingan terhadap rasisme, dan mengorganisasi aksi-aksi politik kolektif (Mundt, Ross, dan Burnett, 2018).

Pada tahun 2017, Facebook juga dimanfaatkan sebagai medium penting dalam kampanye *#MeToo Movement* sebagai ruang produksi wacana tandingan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di Amerika Serikat (Ismahani, Rijal, & Adzmy, 2023). Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan Facebook juga tampak dalam gerakan Reformasi Dikorupsi pada tahun 2019. Gerakan tersebut dilakukan untuk menentang pengesahan revisi UU KPK (LBH Jakarta, 2019). Praktik tersebut tidak hanya berlangsung di pusat-pusat politik strategis di berbagai belahan dunia, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tertinggal, termasuk Kabupaten Lembata, yang secara resmi ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Sejak tahun 2018 hingga 2019, perdebatan mengenai proyek pariwisata Awololong berlangsung dan memicu berbagai pihak terlibat dalam berbagai bentuk tanggapan dan komentar di grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN*.

Grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dibuat pada tanggal 21 November 2011 oleh Frans Paji da Silva dengan jumlah pengguna sebanyak 43,8 ribu orang, sementara *BLN LEMBATA* dibuat tahun 2013 dibuat oleh Sumarlin Wuwur, Agus Nuban dan Yoseph Ladjar, dengan jumlah pengguna sebanyak 50,2 orang. Dua

grup Facebook tersebut lebih sering digunakan untuk membahas pro-kontra pembangunan pariwisata Awololong dibandingkan grup Facebook komunitas Lembata lainnya.



Gambar 1. Postingan Imran Hamsi (Sumber: tangkapan layar pada postingan Imran Hamsi pada grup Facebook INI BARU LEMBATA!)

Keberadaan grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* bertepatan dengan gejolak Arab Spring, bahkan lebih awal daripada fenomena pemanfaatan Facebook di Amerika dalam kampanye *#MeToo Movement* di Amerika Serikat.



Gambar 2. (sumber : Tangkapan layar peneliti di grup Facebook INI BARU LEMBATA!)

Pada periode tahun 2018 hingga 2019, dua grup tersebut berperan sebagai ruang daring pilihan bagi banyak pihak untuk memberikan pernyataan maupun komentarnya mengenai pembangunan pariwisata Awololong. Menurut Rian Odel (wawancara, 2025):

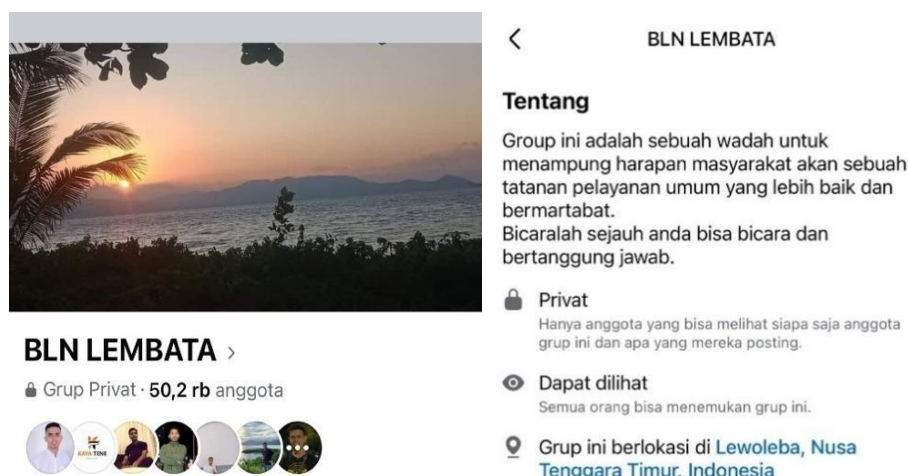
*“Literasi digital khusus di medsos menjadi cara tercepat untuk berinteraksi dan menukar pendapat. Saya memilih dua grup tersebut karena jumlah*

*anggotanya sudah ribuan dan hampir setiap hari dua grup tersebut selalu ramai dengan postingan dan komentar.”*

Hal senada diungkapkan oleh Rivan Sebleku (wawancara, 2025) yang menyebutkan bahwa popularitas grup menjadi alasan dirinya aktif berpartisipasi:

*“Grup FB yang dimaksud adalah grup cukup populer, memiliki banyak anggota. Grup ini juga sangat aktif dan semua hal yang diposting ke grup akan menjadi bahan perhatian publik untuk didiskusikan.”*

Di tengah kondisi ekonomi dan infrastruktur yang buruk, pariwisata Awololong menjadi topik yang problematis. Secara substansi, kronologi pembangunan objek wisata Awololong, berupa jembatan tian, kolam renang apung, pusat kuliner, dan sejumlah fasilitas pendukung dimulai pada 12 Oktober 2018, dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2018. Proyek senilai Rp 6.892.900.000 ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pos Belanja Modal Pembangunan dan Penataan Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata. Pelaksanaan proyek dipercayakan kepada PT Bahana Krida Nusantara berdasarkan kontrak nomor PPK.22/Kontrak/Fisik-Awololong/X/2018 (Ledun, Stefanus dan Udju, 2024).



Gambar 3. (sumber :tangkapian layar peneliti pada profil Grup Facebook BLN LEMBATA)

Secara perencanaan, Awololong termasuk dalam Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kawasan Strategis Pariwisata I, yang fokus pada destinasi strategis Volcano Batutara, Pantai Bour/Waijarang, Bukit Doa Watomiten, Bukit Cinta Wolor Pass, Mangrove Pantai Mutiara, serta objek wisata Awololong. KSP II dan III mengembangkan atraksi wisata lain seperti “Lamalera Whale Catching” dan

“Travel Fishing” di Tanjung Leur beserta potensi bahari, budaya, dan kuliner di sekitarnya (Profil Pariwisata Lembata, 2018). Proyek Awololong menghadapi berbagai kendala. Mulai dari penambahan waktu kerja akibat keterlambatan material sampai di lokasi pengerjaan dan penetapan status “keadaan kahar” karena penolakan masyarakat. Hingga akhir perpanjangan penambahan waktu kerja, proyek tersebut belum terselesaikan meskipun 85% dana telah dicairkan (Ledun, Stefanus dan Udju, 2024).

Proyek Awololong kemudian mangkrak dan menimbulkan persoalan hukum. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur kemudian menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tiang apung, kolam renang, dan fasilitas penunjang lainnya di Pulau Siput Awololong pada 21 Desember 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan, proyek yang ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lembata pada tahun anggaran 2018/2019 tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.446.891.718 atau lebih dari Rp 1 miliar dari total anggaran yang digunakan (Kompas.com, 2022).



Gambar 4. (Sumber: Foto beton/tiang pancang di Pulau Siput/Awololong diperoleh dari bentara.net 2020)

Sebelum menghadapi proses hukum, gelombang penolakan muncul dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Antara lain, Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), Astaga (Aliansi Rakyat Lembata Menggugat), Apperal (Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata), Front Matamera, dan Amara (Aliansi Mahasiswa-Rakyat Lembata) (Sulunusa.com, 2019). Tidak hanya dengan demonstrasi, penolakan juga dilakukan melalui pernyataan terbuka di media, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) NTT (mongabay.co.id, 2019), diaspora Lembata di Jakarta (indonews.id,

2019), diaspora masyarakat Lembata di Kupang (lekontt.com, 2019), serta diaspora Lembata di Jakarta dan Batam (kumparan.com, 2019). Sebaliknya, dukungan terhadap pembangunan muncul dari kelompok masyarakat adat Baolangu yang menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Daerah Lembata (kupang.tribunnews.com, 2019). Pertentangan ini tidak hanya terepresentasi melalui demonstrasi dan pernyataan publik, tetapi juga menguat di ruang digital, khususnya melalui grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA*. Grup Facebook tersebut berfungsi sebagai arena artikulasi berbagai posisi, mulai dari yang mendukung dan menolak pembangunan pariwisata Awololong. Dinamika tersebut dapat dipahami sebagai pertarungan (kontestasi) wacana untuk mencapai hegemoni.

Wacana terbentuk melalui praktik artikulasi yang menghubungkan berbagai *elemen* sosial sehingga menghasilkan makna, pengetahuan, identitas, dan relasi sosial politik (Jorgensen dan Phillips, 2002). Pertentangan (kontestasi) antarwacana melalui praktik artikulasi terlihat dalam interaksi pengguna di grup *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA*, di mana pengguna grup secara aktif mengonstruksi wacana mengenai pembangunan pariwisata Awololong melalui berbagai praktik diskursif. Fenomena tersebut bukan hal baru. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Facebook, telah berfungsi sebagai medium pertarungan diskursif dalam berbagai konteks global dan nasional.

Meski demikian, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana media sosial digunakan sebagai arena pertarungan diskursif di daerah tertinggal. Kekosongan ini menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk memahami bagaimana wacana dikonstruksi melalui praktik artikulasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana wacana dan subjek dikonstruksi serta mengalami kontestasi dalam kasus pembangunan pariwisata Awololong. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Kontestasi Wacana Pembangunan Pariwisata Awololong (Studi Kasus Grup Facebook *BLN LEMBATA* dan *INI BARU LEMBATA!*)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi wacana pembangunan proyek pariwisata Awololong di grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA*?
2. Bagaimana konstruksi subjek dalam wacana pembangunan proyek

pariwisata Awololong di grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLNLEMBATA?*

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana wacana pembangunan proyek pariwisata Awololong dikonstruksi melalui praktik artikulasi dan mengalami kontestasi dalam grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA ?*
2. Mengeksplorasi bagaimana subjek dikonstruksi dalam grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA.*

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Dalam kerangka kajian budaya, penelitian ini berupaya memperkaya literature akademik mengenai praktik kontestasi wacana di ruang digital, khususnya pada konteks wilayah pinggiran di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana media sosial, terutama Facebook, menjadi arena produksi, reproduksi, dan resistensi wacana. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademik bagi pengembangan teori terkait hubungan antara media, identitas, demokrasi, dan praktik budaya kontemporer.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana wacana dikonstruksi melalui praktik artikulasi di media sosial. Dengan menyoroti dinamika diskursif yang terjadi di grup Facebook, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami media sosial bukan semata sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena perjuangan kultural yang memengaruhi proses demokrasi, representasi, serta praktik pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian ini menempatkan diri dalam lanskap kajian wacana digital di media sosial, dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pijakan konseptual sekaligus untuk menegaskan kebaruan penelitian ini. Salah satu studi yang memiliki kedekatan tematik adalah penelitian Numertayasa (2024) berjudul "*Analisis Wacana Kritis pada Wacana di Media Sosial dengan Discourse Network Analysis*". Numertayasa dalam penelitiannya menjelaskan penggunaan metode *Discourse Network Analysis* (DNA) dalam analisis wacana kritis terhadap wacana di media sosial.

Melalui pendekatan *Discourse Network Analysis* (DNA), Numertayasa menemukan fakta penting bahwa media sosial, khususnya Facebook, berperan signifikan dalam membentuk wacana politik, aktivisme, dan konstruksi identitas. Pada penelitiannya tersebut ia memetakan struktur jaringan wacana, termasuk hubungan antar aktor, modularitas, dan sentralitas, untuk memahami dinamika diskursif di ranah media sosial Facebook. Pemetaan tersebut ia lakukan dengan menggunakan konsep DNA dan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Van Dijk melalui penelitian netnografi. Numertayasa menyimpulkan bahwa metode DNA dapat digunakan sebagai salah satu alternatif analisis wacana kritis terhadap wacana di media sosial.

Walaupun memiliki fokus pada wacana di media sosial, penelitian tersebut berbeda secara signifikan dengan penelitian ini. Pertama, Numertayasa lebih menekankan pada pemetaan jaringan interaksi digital melalui data sekunder dan netnografi, sedangkan penelitian ini memanfaatkan data empiris berupa praktik artikulasi melalui unggahan dan komentar di grup Facebook *BLN LEMBATA* dan *INI BARU LEMBATA!*. Kedua, Numertayasa menggunakan kerangka AWK Van Dijk yang menitikberatkan pada kognisi sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, yang menekankan relasionalitas dalam pembentukan wacana melalui artikulasi dan pertentangan antagonis sebagai akibat dari praktik artikulasi wacana yang berbeda.

Penelitian lain yang relevan adalah studi Arsyad dan Nadjib (2011), bertajuk "*Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial: Analisis Wacana*

*Facebook dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan*". Penelitian tersebut berupaya melihat bagaimana transformasi Facebook sebagai jejaring sosial pertemanan menjadi sebuah arena perlawanan. Temuan penelitian Arsyad dan Nadjib menunjukkan bahwa terhambatnya kebebasan berpendapat masyarakat melalui instrumen aspirasi di lembaga legislatif, pemerintah dan media massa telah mendorong masyarakat memanfaatkan Facebook sebagai sarana untuk menyampaikan kritik.

Penelitian tersebut menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk memahami bagaimana pemanfaatan Facebook sebagai media untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, sementara pada penelitian ini, yang menjadi fokus penulis adalah praktik artikulasi untuk membangun, menguatkan, dan meruntuhkan wacana dalam konteks pembangunan objek pariwisata di Pulau Awololong Lembata. Data primer pada penelitian Arsyad dan Nadjib adalah data wawancara dan observasi. Sementara data primer pada penelitian ini adalah unggahan dan komentar pengguna grup Facebook *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA*.

Berbeda dengan penggunaan pendekatan Norman Fairclough pada penelitian tersebut, atau secara umum dengan konsep wacana lainnya, dalam teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985), wacana dipahami mencakup seluruh praktik sosial dan politik. Tidak ada realitas sosial di luar wacana. Praktik sosial itu sendiri merupakan bagian dari wacana. Dengan kata lain, demonstrasi, pernyataan publik, komentar di media sosial, dan interaksi sehari-hari merupakan praktik diskursif yang membentuk makna, identitas, dan relasi dalam masyarakat. Selain itu, perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan Arsyad dan Nadjib, juga terletak pada jenis data dan kerangka analisis. Arsyad dan Nadjib menggunakan wawancara untuk menelusuri opini publik, sedangkan penelitian ini menggunakan data empiris dari praktik artikulasi melalui unggahan dan komentar di grup *INI BARU LEMBATA!* dan *BLN LEMBATA* sebagai akibat dari kebijakan pembangunan objek pariwisata Awololong.

Penelitian relevan selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Arizal (2022), berjudul *"Pertarungan Diskursif Islam Politik dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru"*. Dalam penelitian tersebut, Arizal menyoroti kontestasi wacana di antara berbagai kelompok ideologis Islam politik pasca-Orde Baru, khususnya dalam mengartikulasikan gagasan terkait penerapan syariat Islam. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada proses artikulasi gagasan

antarpertikularitas yang diwujudkan oleh kelompok-kelompok Islamisme, Islam liberal, dan Islam progresif sebagai subjek politik dalam arena diskursif.

Arizal juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana post-Marxis yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Islam politik membangun wacana yang saling berlawanan dan menegasikan satu sama lain, khususnya terkait penerapan perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk memahami dinamika ini, Arizal menggunakan konsep-konsep kunci dari Laclau dan Mouffe, antara lain hegemoni, subjek politik (*political subject*), penanda kosong (*empty signifier*), logika ekuivalensi dan diferensiasi (*logic of equivalence* dan *logic of difference*), serta konsep *the political* yang dikemukakan oleh Mouffe.

Pada penelitiannya Arizal menemukan bahwa antagonisme sosial antarkelompok ideologis dapat ditransformasikan menjadi agonisme, yaitu relasi konfliktual yang tetap mengakui legitimasi pihak lain sebagai *adversary* yang sah. Selanjutnya, Arizal juga menemukan bahwa terjadi perbedaan dalam memahami sekularisme yang berujung pada praktik artikulasi. Kelompok Islamisme menafsirkan sekularisme sebagai sumber disorientasi sosial, lemahnya penegakan hukum, dan krisis moral, sehingga mereka mengartikulasikan penerapan syariat Islam sebagai solusi. Sementara itu, kelompok Islam liberal dan progresif menolak gagasan tersebut dan menawarkan artikulasi alternatif, baik melalui argumentasi konseptual maupun praktik politik.

Relevansi penelitian Arizal dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik artikulasi dalam membentuk makna, identitas dan subjek yang secara otomatis melahirkan pertentangan atau kontestasi. Perbedaannya terletak pada konteks kajian. Arizal meneliti wacana ideologis Islam politik, sedangkan penelitian ini berfokus kebijakan pembangunan objek pariwisata di Pulau Awololong Lembata. Bagaimana wacana dan subjek dibentuk sekaligus terbentuk dari proses artikulasi. Jika pada penelitian Arizal subjek politiknya telah didefinisikan secara tetap, dalam hal ini kelompok Islam politik, maka dalam penelitian ini subjek politik dipetakan sebagai subjek dalam wacana. Artinya penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana subjek terbentuk beriringan dengan pembentukan dan pembongkaran wacana.

Penelitian lain yang relevan adalah studi Kusumastuti (2021) berjudul "*Kontestasi Wacana Islam Nusantara di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Akun Instagram NU Online Tahun 2018)*". Penelitian ini

menelaah bagaimana Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, melakukan *counter discourse* terhadap gagasan puritanisme kelompok konservatif yang berkembang di media sosial Instagram. Penelitian tersebut, sebagaimana penelitian yang dirujuk sebelumnya, menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, kerangka analisis yang diterapkan adalah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis, CDA) ala Norman Fairclough.

Melalui pendekatan ini, Kusumastuti berupaya memahami bahasa sebagai praktik sosial untuk melegitimasi, memelihara, dan menetralisasi relasi kuasa serta ketimpangan sosial dalam konteks dakwah digital. Aspek relasi kuasa dianalisis melalui penggunaan bahasa dalam praktik sosial, bukan sebagai konstruksi yang inheren dalam wacana itu sendiri. Meskipun komprehensif, pendekatan Fairclough memisahkan wacana dari praktik sosial. Dengan kata lain, praktik sosial dipahami sebagai konteks atau dimensi terpisah yang diwakili atau dijalankan melalui bahasa.

Sebaliknya, penelitian ini menggunakan teori wacana Laclau dan Mouffe yang menegaskan bahwa praktik sosial itu sendiri adalah bagian integral dari wacana. Wacana bukan sekadar representasi atau refleksi praktik sosial, melainkan arena di mana identitas, makna, dan relasi sosial dibangun, dipertahankan, dan diperebutkan (Jorgensen dan Phillips, 2002). Dengan kerangka ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi posisi-posisi diskursif antarpihak yang melakukan praktik artikulasi untuk membentuk wacana dan subjek.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Wacana**

Wacana adalah cara kita menghubungkan kata-kata, konsep, dan praktik sosial sehingga membentuk makna tertentu dalam masyarakat. Wacana bukan hanya soal bahasa atau ucapan, tetapi cara berpikir yang membuat sesuatu dipahami dengan cara tertentu. Melalui wacana, orang menentukan apa yang dianggap benar, penting, atau wajar. Dalam wacana, biasanya ada istilah atau konsep kunci yang menjadi pusat makna atau *titik nodal* (Laclau dan Mouffe, 1985). Di sekitar konsep inilah makna-makna lain diatur dan distabilkan. Titik ini membuat makna terlihat stabil, tapi sebenarnya tetap bisa berubah jika ada praktik sosial baru yang menantanginya. Misalnya, kata “demokrasi”. Dalam wacana politik, demokrasi bisa dimaknai berbeda oleh kelompok yang berbeda. Bagi satu kelompok, demokrasi mungkin berarti partisipasi rakyat penuh dalam pengambilan keputusan. Bagi

kelompok lain, demokrasi bisa dimaknai sebagai stabilitas politik dan hukum yang teratur. Kedua makna ini saling berkompetisi, dan stabilitas makna “demokrasi” hanya terjadi karena ada *titik nodal* tertentu, misalnya “hak suara rakyat”.

Teori wacana yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe menekankan bahwa makna sosial tidak bersifat tetap dan selalu terbuka untuk konstruksi dan rekonstruksi melalui praktik sosial. Mereka menolak gagasan bahasa sebagai struktur stabil dan menolak pemisahan tajam antara *langue* dan *parole* (Jorgensen dan Phillips, 2002). Wacana adalah keseluruhan sistem tanda, yang maknanya sudah lebih stabil mengenai suatu aspek kehidupan. Penjelasan Laclau dan Mouffe mengenai wacana dapat dilihat dari pandangan mereka di bawah ini:

*“We will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated (Laclau dan Mouffe, 1985).”*

*“Kita akan menyebut artikulasi sebagai setiap praktik atau tindakan yang membentuk hubungan antara berbagai unsur sehingga identitas masing-masing unsur tersebut berubah karena proses penghubungan itu. Keseluruhan yang tersusun dan terbentuk dari proses artikulasi itu kita sebut wacana (discourse). Posisi-posisi yang berbeda, selama mereka terhubung dan diberi makna di dalam suatu wacana, kita sebut momen. Sebaliknya, kita menyebut unsur (element) sebagai setiap perbedaan yang belum dihubungkan atau belum diberi makna di dalam suatu wacana.”*

Unsur terkecil dalam wacana adalah *elemen* dan *momen*. *Elemen* adalah unit makna atau tanda yang belum memiliki makna yang relatif stabil. Sebaliknya, *momen* adalah tanda-tanda yang telah diposisikan secara diferensial dalam suatu wacana dan memperoleh makna melalui relasinya dengan tanda-tanda lain (Laclau dan Mouffe, 1985). Sebagai contoh, tanda “kemerdekaan” dapat dipahami sebagai *elemen* karena memiliki banyak kemungkinan makna. Namun, ketika istilah tersebut dihubungkan dengan konsep politik, ekonomi, dan pendidikan, istilah-istilah tersebut berfungsi sebagai *momen* yang secara bersama-sama membentuk pemaknaan tertentu tentang kemerdekaan.

### 2.2.2 Artikulasi

Proses menghubungkan *elemen-elemen* (tanda, kata, konsep, istilah) tersebut menjadi *momen-momen* dalam suatu sistem makna disebut sebagai artikulasi. Artikulasi didefinisikan sebagai praktik sosial yang membangun relasi antara *elemen-elemen* sedemikian rupa sehingga identitas makna mereka dimodifikasi (Laclau dan Mouffe, 1985). Melalui praktik artikulasi makna diproduksi secara aktif melalui interaksi sosial, bukan sebagai sesuatu yang bersifat alami atau sudah ada sebelumnya. Setiap pernyataan, teks, atau diskusi yang mengaitkan *elemen-elemen* (penanda) tertentu dapat dipahami sebagai bentuk praktik artikulatoris. Misalnya, ketika “kemerdekaan” dikaitkan dengan “ekonomi” dan “kewirausahaan”, maka terbentuk wacana baru mengenai kemerdekaan ekonomi yang berbeda dari pemaknaan kemerdekaan sebagai kebebasan politik. Artikulasi dengan demikian berfungsi untuk mengonstruksi sebuah wacana tertentu.

### 2.2.3 Bidang Diskursif

Hasil dari praktik artikulasi tersebut adalah wacana, yang dipahami sebagai upaya sementara untuk menetapkan makna dan menutup ketidakpastian makna yang melekat pada kehidupan sosial (Jorgensen dan Phillips, 2002). Penetapan makna dalam wacana selalu bersifat parsial dan tidak pernah final, karena selalu terdapat kemungkinan bagi praktik artikulasi lain untuk menantanginya. Setiap wacana selalu beroperasi dalam relasinya dengan bidang diskursif (*field of discursivity*), yaitu keseluruhan kemungkinan makna lain yang tidak dimasukkan atau dikecualikan dari wacana tertentu. Ketika suatu wacana menegaskan makna tertentu, ia secara simultan menyingkirkan makna-makna alternatif yang berpotensi muncul (Laclau, 1990). Sebagai contoh, wacana kemerdekaan politik yang menekankan hak suara dan partisipasi dalam pemerintahan cenderung mengecualikan pemaknaan kemerdekaan sebagai kemandirian ekonomi atau keadilan sosial.

### 2.2.4 Hegemoni dan Antagonisme

Dalam hubungan antarwacana tersebut, Laclau dan Mouffe memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana suatu wacana dapat menjadi dominan. Hegemoni merujuk pada proses di mana makna tertentu berhasil dipresentasikan sebagai makna yang umum, wajar, dan seolah-olah alamiah,

sementara makna alternatif dipinggirkan (Laclau dan Mouffe, 1985). Namun, hegemoni tidak pernah sepenuhnya stabil karena selalu bergantung pada kondisi sosial dan praktik artikulatoris yang mendukungnya. Oleh karena itu, selalu terdapat potensi bagi wacana lain untuk menantang makna dominan, sehingga memunculkan kontestasi wacana. Kontestasi ini menegaskan bahwa makna sosial tidak pernah bersifat final dan selalu terbuka untuk diperdebatkan. Dalam kondisi tertentu, kontestasi wacana dapat berkembang menjadi antagonisme, yakni ketika dua wacana saling meniadakan dan tidak dapat direkonsiliasikan. Antagonisme menandai adanya batas tegas antara posisi “kami” dan “mereka”, di mana keberlakuan satu makna hanya dimungkinkan melalui penolakan terhadap makna yang lain (Laclau, 1996). Sebagai contoh, perbedaan pemaknaan kemerdekaan sebagai hak politik dan sebagai hak ekonomi dapat berkembang menjadi hubungan antagonistik ketika masing-masing pihak memosisikan pemaknaannya sebagai satu-satunya makna yang sah.

### **2.2.5 Floating Signifier dan Empty Signifier**

Dalam dinamika perebutan makna tersebut, Laclau dan Mouffe juga memperkenalkan konsep *floating signifier* dan *empty signifier*. *Floating signifier* merujuk pada penanda yang maknanya tidak tetap dan dapat diisi dengan berbagai makna oleh aktor yang berbeda (Laclau, 1996). Istilah “kemerdekaan”, misalnya, dapat dimaknai secara berbeda oleh aktor politik, ekonom, maupun aktivis sosial. Sementara itu, *empty signifier* adalah penanda yang dikosongkan dari makna partikular tertentu dan kemudian diisi dengan makna hegemonik untuk menyatukan berbagai tuntutan dan *elemen* wacana yang berbeda ke dalam satu kesatuan (Laclau, 2005). Istilah seperti “kemajuan” dapat berfungsi sebagai *empty signifier* karena mampu merangkum beragam agenda—ekonomi, teknologi, dan pendidikan—dalam satu kerangka wacana yang dominan.

### **2.2.6 Dislokasi**

Konsep terakhir yang penting adalah dislokasi, yaitu kondisi ketika wacana dominan mengalami gangguan atau krisis sehingga makna yang sebelumnya relatif stabil menjadi dipertanyakan. Dislokasi mengungkapkan sifat kontingen dari setiap tatanan makna dan membuka ruang bagi munculnya praktik artikulasi baru (Laclau, 1990). Sebagai contoh, krisis ekonomi dapat mendislokasi wacana kemerdekaan ekonomi yang sebelumnya dominan, sehingga memunculkan

interpretasi baru mengenai makna kemerdekaan. Dalam konteks ini, artikulasi menjadi mekanisme utama melalui mana subjek-subjek sosial secara aktif membentuk dan merundingkan makna, termasuk dalam ruang-ruang digital yang memungkinkan kontestasi wacana berlangsung secara intensif.

### **2.2.7 Reartikulasi**

Reartikulasi adalah proses diskursif yang terjadi ketika struktur wacana lama mengalami ketidakstabilan atau dislokasi, sehingga hubungan antar-*elemen* (penanda) yang sebelumnya mapan menjadi terbuka untuk disusun kembali. Dalam proses ini, *elemen-elemen* wacana dirangkai ulang untuk membentuk konfigurasi makna, identitas subjek, dan hubungan kekuasaan yang baru. Reartikulasi sebagai proses memungkinkan aktor politik untuk memperkuat wacana dominan atau membangun alternatif, serta menegaskan kembali atau menegosiasikan identitas kolektif.

### **2.2.8 Disartikulasi**

Disartikulasi adalah proses terputusnya atau terlepasnya hubungan antar-*elemen* dalam suatu wacana, sehingga *elemen-elemen* (penanda) yang sebelumnya terikat dalam struktur tertentu menjadi longgar dan kehilangan makna yang mapan. Disartikulasi terjadi ketika struktur wacana mengalami tekanan, konflik internal, atau ketidakstabilan, namun berbeda dengan dislokasi, ia tidak selalu mengguncang seluruh struktur wacana secara radikal. Disartikulasi lebih bersifat parsial dan relasional, memengaruhi hubungan antar-*elemen* tertentu saja, sementara dislokasi menunjuk pada krisis struktural yang mengguncang keseluruhan wacana dan identitas subjek.

### **2.2.9 Subjek dan Subjek Kolektif**

Secara sederhana dapat diumpakan bahwa subjek adalah masyarakat adat yang bertindak bersama dalam arena politik dan memiliki tuntutan politik yang diartikulasi secara bersama. Sementara itu subjek kolektif adalah subjek. Subjek kolektif merupakan subjek yang terhubung dan bergerak bersama melalui kesamaan tuntutan, oposisi terhadap pihak lain, dan membentuk aktor politik yang lebih luas dan mampu memengaruhi wacana. Subjek kolektif muncul ketika individu atau kelompok menyadari adanya persamaan tuntutan, kepentingan, atau

ideologi, sekaligus membedakan diri dari kelompok lain yang dianggap menindas atau menghalangi tuntutan tersebut (Mouffe, 2018).

Proses pembentukan subjek kolektif dimulai dari pembedaan internal dan eksternal. Pembedaan internal terjadi antaranggota kelompok yang kemudian membentuk solidaritas internal, sedangkan pembedaan eksternal terjadi antara kelompok dengan pihak luar sehingga membentuk batas identitas yang bersifat temporer. Hubungan internal dan eksternal ini bersifat antagonistik, yang memungkinkan kelompok mengartikulasikan tuntutan politik mereka terhadap rezim hegemonik yang sedang dilawan. Selanjutnya, berlangsung proses identifikasi internal dan eksternal. Identifikasi internal membentuk “kita”, yaitu kesadaran kolektif anggota kelompok, sedangkan identifikasi eksternal membentuk “mereka”, pihak yang diposisikan sebagai lawan atau penindas. Subjek kolektif atau *the people* terbentuk melalui mekanisme *chain of equivalence*, yaitu proses artikulasi yang menyatukan tuntutan, identitas, atau kelompok sosial yang berbeda ke dalam satu kesetaraan simbolik terhadap lawan bersama.

Mekanisme ini memungkinkan kelompok-kelompok sosial bertindak sebagai satu subjek kolektif tanpa menghapus identitas yang sifatnya spesifik dari masing-masing subjek (Laclau dan Mouffe, 1985). Proses ini terjadi di *political frontier*, yaitu garis pemisah antara “kita” dan “mereka” ketika hegemoni dominan tidak lagi mampu mengakomodasi tuntutan sosial. Dalam konteks tersebut, terbentuk blok hegemonik alternatif yang menantang tatanan dominan, dengan subjek kolektif bertindak sebagai basis pergerakan politik (Laclau dan Mouffe, 1985).

### 2.3. Kerangka Pikir

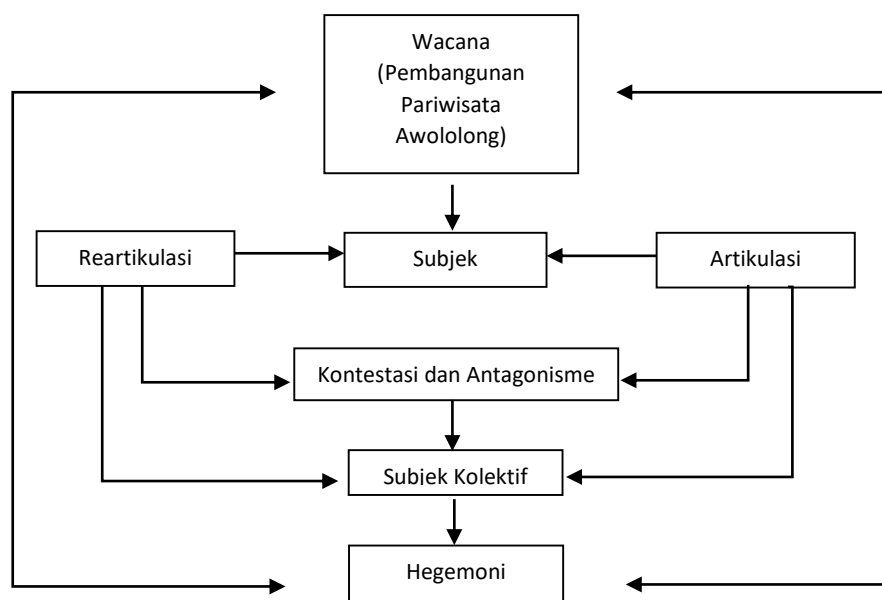
Wacana selalu bersifat kontingen, artinya tidak ada makna atau identitas yang bersifat tetap. *Elemen-elemen* wacana—seperti pernyataan, simbol, dan identitas sosial—terhubung melalui artikulasi, membentuk struktur makna yang relatif stabil. Hubungan antar-*elemen* (penanda) ini membentuk rantai ekuivalensi, di mana berbagai penanda yang berbeda disatukan untuk membentuk wacana, misalnya identitas “rakyat Lembata” dan urgensi pariwisata. Namun, stabilitas ini tidak permanen. Ketika terjadi dislokasi, struktur wacana lama mengalami krisis yang mengguncang makna dan identitas subjek. Dalam fase ini, sebagian *elemen* dapat terputus dari relasinya, yang disebut disartikulasi. Rantai ekuivalensi yang menghubungkan tuntutan menjadi putus, sehingga identitas kolektif menjadi

longgar dan tidak stabil. Disartikulasi menandai bahwa struktur lama kehilangan kekuatannya, tetapi tidak selalu menghancurkan seluruh wacana—ia membuka ruang bagi transformasi

Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan melalui reartikulasi, yaitu proses di mana *elemen-elemen* yang terdisartikulasi dirangkai kembali dalam konfigurasi baru. Reartikulasi dapat digunakan untuk memperkuat wacana dominan atau membangun wacana alternatif. Melalui proses ini, rantai ekuivalensi baru terbentuk, menghubungkan tuntutan-tuntutan yang sebelumnya terpecah, sehingga muncul subjek kolektif baru dan wacana sosial-politik mengalami transformasi.

Transformasi ini menimbulkan kontestasi, karena wacana baru selalu berada dalam hubungan pertentangan dengan wacana lain. Pertentangan ini disebut antagonisme, yaitu situasi di mana identitas kolektif dan tuntutan-tuntutan politik berada dalam oposisi dengan “lawan” atau elite yang berbeda kepentingan. Dalam konteks ini, hegemoni muncul sebagai upaya untuk menyatukan berbagai tuntutan yang berbeda di bawah satu proyek politik tunggal, membangun keterpaduan makna, dan menegaskan dominasi wacana tertentu.

**Bagan 1.** Kerangka Pikir penelitian



#### 2.4. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah wacana, pembangunan objek pariwisata Awololong, artikulasi, dislokasi, disartikulasi, reartikulasi, subjek, subjek kolektif,

antagonisme, dan hegemoni dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Wacana dan Kontestasi Wacana.** Wacana merupakan rangkaian kata-kata, konsep, dan praktik sosial yang membentuk makna tertentu dalam masyarakat. Wacana mencakup keseluruhan sistem bahasa, ucapan, simbol, dan cara berpikir yang membuat sesuatu dipahami dengan cara tertentu. Melalui wacana, orang menentukan apa yang dianggap benar, penting, atau wajar. Pengertian kontestasi wacana merujuk pada sebuah proses pertarungan makna, identitas, dan posisi politik melalui perebutan hegemoni, seperti perdebatan, kompetisi politik atau pertarungan wacana melalui praktik artikulasi.
2. **Pembangunan Pariwisata Awololong** merupakan keseluruhan tindakan pembangunan objek pariwisata Awololong yang bersumber dari pandangan, pernyataan, dan makna dominan mengenai “pembangunan”, “pariwisata” dan “Awololong”. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Awololong dihegemoni oleh cara pandang wacana urgensi pariwisata. Walau demikian, makna dominan pada *elemen-elemen* (penanda) kunci tersebut selalu dalam posisi yang tidak stabil, atau dengan kata lain, selalu diperebutkan oleh berbagai wacana tandingan melalui praktik artikulasi.
3. **Artikulasi dan Konstruksi Wacana.** Artikulasi adalah proses menghubungkan berbagai *elemen* (penanda) agar terbentuk dalam konfigurasi makna. Praktik ini tampak dari pola pengaitan isu, penegasan hubungan sebab-akibat, dan upaya menampilkan makna tertentu sebagai wajar dan sah. Makna, identitas dan kepentingan ideologi dan politik tertentu dapat terus berada dalam posisi hegemonik atau bahkan sebaliknya, runtuh karena praktik artikulasi tandingan. Dalam penelitian ini, konstruksi wacana adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses terbentuknya wacana melalui praktik artikulasi.
4. **Reartikulasi** adalah proses di mana *elemen-elemen* (penanda) sosial atau simbolik yang tadinya mengalami disartikulasi atau kehilangan makna tunggal disusun kembali untuk membentuk makna baru atas dasar tujuan politik atau ideologi tertentu.
5. **Disartikulasi** adalah proses di mana suatu wacana yang telah ada kehilangan kemampuannya untuk memfiksasi (menetapkan) makna, sehingga membuka ruang bagi praktik artikulasi yang baru.
6. **Subjek** didefinisikan sebagai posisi identitas yang terbentuk melalui praktik

artikulasi dalam wacana pembangunan objek pariwisata Awololong Lembata. Subjek politik dikenali melalui cara subjek menamakan diri sebagai, atau memposisikan diri secara berbeda dengan pihak lain. Misalnya sebagai masyarakat adat, pemerintah daerah, nelayan, atau pihak luar, serta melalui klaim otoritas untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu.

7. **Antagonisme** adalah relasi konflik diskursif yang terjadi ketika dua posisi wacana tidak dapat disatukan, membentuk batas tegas antara “kita” dan “mereka” sebagai dua posisi yang berlawanan. Proses antagonisme hanya berakhir ketika terjadi intervensi hegemonik melalui praktik artikulasi oleh suatu wacana lebih dominan.
8. **Agonisme** adalah relasi politik di mana pihak lain diakui sebagai lawan yang sah, bukan musuh yang harus dihancurkan. Dalam konteks ini, konflik tetap ada, tetapi dikelola secara terbuka dan demokratis, memungkinkan negosiasi, kritik, dan pembatasan melalui norma tertentu. Dalam konteks ini, subjek memperoleh identitas politiknya bukan melalui penolakan radikal, tetapi melalui kemampuan menantang hegemoni secara parsial sambil tetap berpartisipasi dalam arena politik yang sama
9. **Subjek Kolektif (*The Peopole*)** muncul dari proses artikulasi dan antagonisme, berupa identitas bersama dari berbagai subjek yang berbeda, yang menyatukan berbagai tuntutan dan pengalaman kolektif. Subjek kolektif dikenali melalui penggunaan narasi kolektif, kata ganti bersama (“kita”, “kami”), dan klaim representasi kepentingan publik sebagai gabungan dari identitas, subjek dan tuntutan.
10. **Hegemoni** adalah proses di mana suatu wacana berhasil menstabilkan diri sebagai makna dominan dalam proses kontestasi wacana yang antagonis. Hegemoni terjadi sebagai akibat dari proses antagonisme dalam kontestasi wacana.